

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 24 April 2020



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia, Halaman 6	Jumat, 24 April 2020	Berita foto: Tol Layang Jakarta-Cikampek Ditutup	Polda Metro Jaya menyiapkan penutupan tol layang Jakarta-Cikampek terkait dengan kebijakan larangan mudik yang diterbitkan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19.
2	Bisnis Indonesia, Halaman 6	Jumat, 24 April 2020	Inkindo Minta Kebijakan Seragam	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) meminta proses terkait proyek ibu kota negara harus transparan dan mengacu pada peraturan yang berlaku.
3	Kompas, Halaman 14	Jumat, 24 April 2020	Persiapan PON dan Peparnas 2020 Berlanjut	Meskipun ditunda ke tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan persiapan Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paraolimpiade Nasional di Papua tetap berlanjut.

Judul	Berita foto: Tol Layang Jakarta-Cikampek Ditutup	Tanggal	Jumat, 24 April 2020
Media	Bisnis Indonesia, Halaman 6		
Resume	Polda Metro Jaya menyiapkan penutupan tol layang Jakarta-Cikampek terkait dengan kebijakan larangan mudik yang diterbitkan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19.		

■ TOL LAYANG JAKARTA-CIKAMPEK DITUTUP



Bisnis/Arief Hermawan P.

Kendaraan melintas di jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Kamis (23/4). Polda Metro Jaya menyiapkan penutupan tol layang Jakarta-Cikampek terkait dengan kebijakan larangan mudik yang diterbitkan pemerintah untuk mencegah

penyebaran COVID-19. Penutupan dilaksanakan bertepatan dengan dimulainya Operasi Ketupat Jaya 2020 pada Jumat pukul 00.00 WIB dan berakhir pada H+7 Lebaran 2020.

Judul	Inkindo Minta Kebijakan Seragam	Tanggal	Jumat, 24 April 2020
Media	Bisnis Indonesia, Halaman 6		
Resume	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) meminta proses terkait proyek ibu kota negara harus transparan dan mengacu pada peraturan yang berlaku.		

| PROYEK IBU KOTA BARU |

Inkindo Minta Kebijakan Seragam

Bisnis, JAKARTA — Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) meminta proses terkait proyek ibu kota negara harus transparan dan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Peter Frans menyatakan sampai saat ini ada simpang siur kelanjutan proyek ibu kota negara (IKN) baru sempat menghangat di tengah pandemi virus corona (COVID-19).

Menurutnya, pemindahan ibu kota negara merupakan keputusan politik Presiden Joko Widodo yang seharusnya didukung oleh para menteri sebagai pembantu presiden.

"[Yang terjadi] tidak ada koordinasi soal IKN, harus disinkronkan. Ini keputusan politik dari Presiden jangan ada beda pendapat di menterinya," ujarnya dalam diskusi daring yang diadakan Ikatan

Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Kamis (23/4).

Menurutnya, ada yang aneh secara aturan karena di satu sisi Kementerian PUPR tidak mengalokasikan anggaran, sementara Bappenas justru telah melakukan kegiatan studi kelayakan dan *master plan*.

"Kita belum punya regulasi yang kuat untuk IKN tapi aneh ada kementerian yang menginisiasi anggaran untuk IKN," jelasnya.

Dia juga menyayangkan penunjukan secara langsung yang dilakukan Bappenas tanpa proses lelang dan tender.

Dia menambahkan memang terdapat dua rumpun aturan yaitu konstruksi dan nonkonstruksi, tetapi proses IKN seharusnya bisa lebih terbuka. "Inkindo sebenarnya sudah mengirim surat ke Bappenas untuk menolak dengan keras penunjukkan langsung yang dilakukan Bappenas terhadap

master plan yang diumumkan," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian mengatakan proses yang berlangsung di DPR juga stagnan karena kondisi pandemi COVID-19.

Dari pansus yang ada, belum satu suara soal hasil kajian pemerintah tentang IKN. Padahal, alokasi anggaran bisa dilakukan jika sudah ada aturannya. "Sampai hari ini Komisi II belum *bikin* Panja apapun termasuk RUU IKN, jadi bisa dikatakan, memang sebetulnya, *unfortunately* [untuk] yang mendukung IKN sebenarnya proses politik di DPR agak stagnan," jelasnya.

Sekjen Fitra Mishbah Hasan mengatakan persoalan anggaran IKN nantinya perlu dibahas kembali mengingat ada realokasi dan *refocusing* yang dilakukan untuk penanganan pandemi COVID-19. (Agne Yasa)

Judul	Persiapan PON dan Peparnas 2020 Berlanjut	Tanggal	Jumat, 24 April 2020
Media	Kompas, Halaman 14		
Resume	Meskipun ditunda ke tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan persiapan Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paraolimpiade Nasional di Papua tetap berlanjut.		

Persiapan PON dan Peparnas 2020 Berlanjut

Meskipun ditunda ke tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan persiapan Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpiade Nasional di Papua tetap berlanjut.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akhirnya memutuskan menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2020 di Papua hingga Oktober 2021. Meskipun ditunda, Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan persiapan PON dan Peparnas tetap berlanjut. Hal itu untuk mengantisipasi infrastruktur yang telah dibangun terbengkalai kalau proyek dihentikan.

Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas (ratas) tertutup yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara virtual, Kamis (23/4/2020). Hadir dalam ratas ini, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, serta Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.

Seusai ratas, Menpora Zainudin Amali menyampaikan beberapa pertimbangan untuk menunda PON dan Peparnas, di antaranya penyelesaian pekerjaan fisik arena yang tertunda karena wabah Covid-19. Pengadaan peralatan olahraga untuk bertanding juga terhambat.

Zainudin menuturkan, walaupun ditunda, Kemenpora tetap meminta segala persiapan PON 2020 yang tetap bisa dikerjakan harus terus dilanjutkan, tetapi tetap menyesuaikan

kondisi yang ada.

Menurut Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto, Kemenpora menyiapkan anggaran Rp 288 miliar untuk pelaksanaan dan Rp 191 miliar untuk pengadaan peralatan PON Papua, serta Rp 40 miliar untuk pelaksanaan Peparnas 2020. Namun, semua anggaran itu akan dialihfungsikan untuk penanganan Covid-19.

"Itu sudah menjadi kewajiban. Kalau kami tidak gunakan sekarang, itu menjadi beban sisa anggaran dan berpotensi jadi temuan BPK. Apalagi negara juga lagi butuh dana itu untuk penanganan kondisi darurat. Namun, tahun depan, kami berharap anggaran itu bisa dianggarkan kembali (diganti) oleh Kementerian Keuangan minimal dengan nilai yang sama," ujarnya.

Pembangunan berlanjut

Gatot menambahkan, hal itu bukan berarti akan menghentikan segala persiapan PON. Ia memastikan, persiapan yang masih bisa dikerjakan akan terus dilanjutkan, seperti penyediaan dokumen pengadaan peralatan sehingga bisa langsung diadakan sejak awal 2021.

"Walau ada di ranah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kami juga berharap persiapan infrastruktur PON 2020 terus berlanjut. Kalau berhenti, itu bisa ber-

dampak besar terhadap keberlanjutan pembangunan," katanya.

Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana Pendukung Infrastruktur PON Papua dari Kementerian PUPR Iwan Suprianto mengutarakan, pihaknya tetap melanjutkan proyek pembangunan di bawah naungan APBN.

Apalagi mereka terikat dengan kontrak kerja dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan PON dan Peparnas 2020. Mereka juga terikat Inpres No 1/2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON dan Peparnas 2020.

"Jadi, kami tetap bekerja dan mencapai target penyelesaian yang ada, yakni target semua infrastruktur di bawah APBN rampung pada Juli. Anggaran Kementerian PUPR untuk persiapan PON Papua tidak dipotong ataupun dialihkan untuk Covid-19," katanya.

Iwan mengatakan, wabah Covid-19 menyebabkan pekerja yang semula bekerja tiga giliran dalam 24 jam menjadi hanya separuh. Saat ini semua material utama sudah tiba di Papua, hanya 15 persen material tambahan yang belum datang.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan, keputusan Presiden Jokowi menunda PON di Papua berdampak positif bagi penyelenggara. "De-

ngan adanya penundaan, memberikan waktu yang cukup bagi kami untuk mempersiapkan arena, atlet, hingga panitia PON," kata Klemen.

Kebutuhan anggaran yang disiapkan untuk pembangunan arena PON dan persiapan atlet serta panitia tahun 2019 sebesar Rp 4 triliun. Anggaran PON yang diusulkan dalam APBD perubahan Pemerintah Provinsi Papua tahun ini sebesar Rp 2 triliun. "Kami telah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan Covid-19. Sementara untuk pelaksanaan PON bisa menggunakan APBD tahun depan," ujar Klemen.

Ketua Harian Panitia Besar PON XX Papua Yunus Wonda mengatakan, penundaan PON sangat membantu pihaknya sebagai penyelenggara. Sebab, panitia masih terkendala dalam mendatangkan alat. "Penundaan memberi kesempatan untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah yang baik," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Alex Kapisa mengatakan, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi 11 arena PON yang bersumber dari APBD Papua tetap berjalan sesuai kontrak. "Penundaan PON tak menghambat pembangunan dan rehabilitasi arena PON. Kami tetap menargetkan kedua kegiatan ini tuntas pada Juni nanti," ujarnya. (NIN/DRI/FLO)